

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan pada sektor riil. Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi barang atau jasa. Kelancaran investasi, distribusi dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Menurut UU No 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter dengan dapat mengatur perputaran uang pada masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank menurut undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan undang-undang tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, pada

semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memberikan kredit berupa kredit investasi dan kredit konsumsi.

Salah satu fungsi bank yang sangat vital terutama dalam membantu transaksi bisnis adalah penyediaan jasa-jasa bank guna memperlancar lalu lintas pembayaran. Di antara fungsi bank adalah memberikan kredit kepada nasabah. Di era perkembangan bisnis yang semakin meningkat dan tentunya adanya persaingan yang sangat ketat dalam dunia bisnis memicu para pembisnis untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Adanya tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi juga mempengaruhi untuk peminjaman dana di bank. Peranan bank sangat penting dalam perekonomian negara yaitu dengan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna jasa bank, dimana dana tersebut merupakan istilah perbankan yang disebut sebagai kredit. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Undang-undang Perbankan 10, 1998). Pihak bank akan mengandalkan pemberian kredit terhadap nasabah sebagai upaya untuk mendapatkan laba di samping aktivitas pelayanan lainnya. Karena dalam pemberian kredit bank maka bank akan mendapatkan pengembalian bunga dari setiap jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang dapat dilakukan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk atau dipergunakan untuk investasi dan akan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pentingnya kredit adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan

ekonomi masyarakat dalam modal kerja maupun investasi. Selain dalam lingkup masyarakat, kredit juga membantu pemerintah dimana semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembarakan bagi pihak bank yaitu apabila kredit yang diberikan terjadi menjadi kredit yang bermasalah. Terlebih lagi jika melihat kondisi perekonomian saat ini, banyak perusahaan-perusahaan, badan usaha, dan orang pribadi yang mengajukan peminjaman kredit ke bank. Bank tentunya harus bisa lebih selektif dalam memberikan pinjaman kredit, karena dalam kondisi krisis seperti ini, risiko terjadinya kredit bermasalah sangatlah besar. Dengan meminimalisasi jumlah kredit bermasalah, maka upaya untuk mewujudkan tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anasthasia, Darmawan, Werastuti (2015) yang meneliti dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri”. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap pemberian kredit pada BRI Unit Banyuasri harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Kemudian pengumpulan informasi untuk mengetahui kebenaran data pemohon kredit dan yang terakhir adalah persetujuan pencairan kredit. Dari hasil penelitian tersebut telah dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi kredit bermasalah.

Utami, Zukhri, dan Cipta (2014) dengan judul penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Intern dan Penanganan Kredit Macet pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja”. Penelitian tersebut menggunakan jenis data kualitatif yang kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan prosedur pemberian kredit dijalankan dalam Koperasi Swastiastu Singaraja, selain itu menguraikan juga beberapa faktor penyebab kredit macet dan cara penanganannya.

Bank harus mengelola kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah masih pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut karena pendapatan terbesar dari bank adalah dari penyaluran kredit. Bank sebagai pemberi fasilitas kredit diwajibkan untuk menerapkan pengendalian internal yang baik. Salah satu bank penyalur kredit yang ada di Kota Gresik yaitu PD. BPR Bank Gresik.

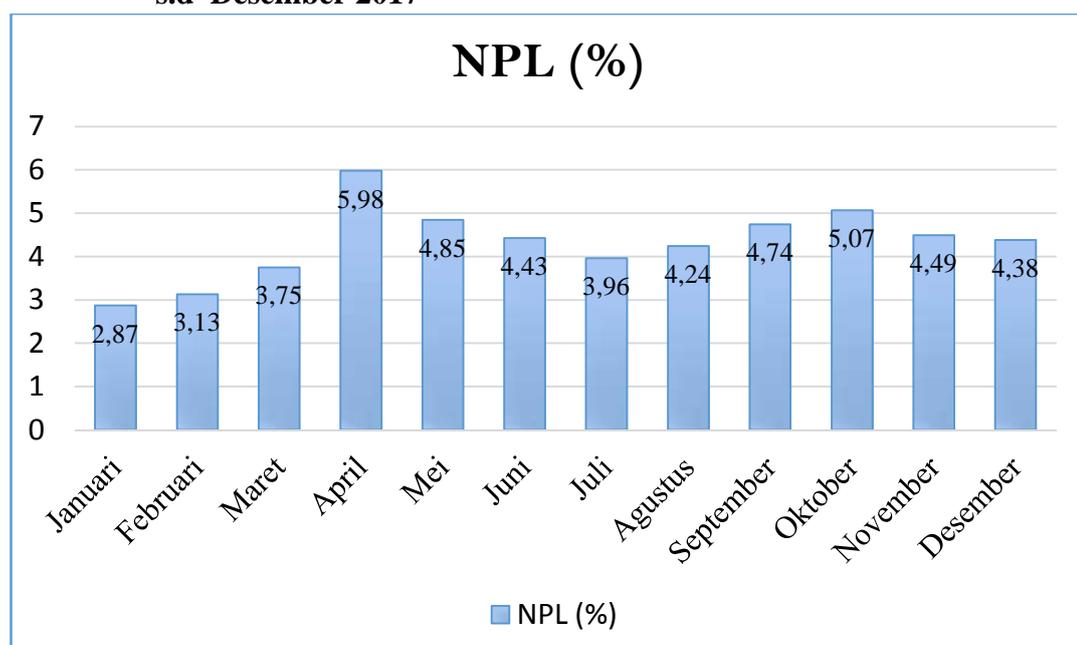
PD. BPR Bank Gresik salah satu bank perkreditan rakyat yang ada di Gresik yang memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat. PD. BPR Bank Gresik merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk dalam bentuk hukum BPR sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1998. Kredit yang ditawarkan oleh PD. BPR Bank Gresik adalah solusi finansial untuk memenuhi kebutuhan bisnis masyarakat dengan berbagai fasilitas pinjaman. Jenis kredit yang ditawarkan oleh PD. BPR Bank Gresik adalah kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah, sebagai salah satu contohnya yaitu nasabah yang memiliki usaha dalam bidang perdagangan, jasa, pertanian, dan industri. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Sebagai contoh usaha dalam bidang industri

yaitu dapat digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan untuk kantor. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Penggunaan dalam kredit ini biasanya untuk pembelian mobil atau barang-barang konsumsi lainnya.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh Bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Secara prinsip, PD. BPR Bank Gresik tidak menginginkan adanya kredit bermasalah. Namun, sebagai salah satu kegiatan bisnis maka tidak ada bisnis yang tidak ada risikonya.

Setiap bank tidak terlepas dari adanya kredit bermasalah, termasuk halnya dengan PD. BPR Bank Gresik dalam menyalurkan kreditnya. Berikut data kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Gresik pada bulan Januari s.d Desember 2017.

Tabel 1.1 Kredit Bermasalah di PD. BPR Bank Gresik periode Januari s.d Desember 2017



Sumber: Lampiran data diolah

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Indikator tersebut merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas. *Non Performing Loan* (NPL) juga dikenal dengan sebutan kredit bermasalah. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Artinya, *Non Performing Loan* (NPL) dapat berdampak pada berkurangnya modal bank.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2017 kredit bermasalah di PD. BPR Bank Gresik mengalami fluktuasi. Jumlah kredit bermasalah paling tinggi adalah bulan April yaitu Rp 1.904.808.847. Kenaikan jumlah kredit bermasalah paling tinggi juga terjadi pada bulan April yaitu dari Rp 1.042.720.287 menjadi Rp 1.904.808.847 di bulan April atau meningkat sebesar Rp 862.088.560 dari bulan Maret. Penurunan kredit bermasalah selama periode Januari sampai Desember Tahun 2017 yang paling besar terjadi pada bulan Januari. Namun, pada bulan Oktober kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Gresik meningkat kembali dengan jumlah 1.360.553.890. Pada bulan April dan Oktober jika di persentasekan *Non Performing Loan* (NPL) mencapai diatas 5%, yaitu pada bulan April sebesar 5,98% dan bulan Oktober sebesar 5,07%. Artinya, angka tersebut melebihi ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 5% dan dapat dikatakan bahwa pada kondisi bulan April dan Oktober PD. BPR Bank Gresik tidak sehat. PD. BPR Bank Gresik mengalami fluktuasi bahkan kenaikan dalam jumlah kredit bermasalah. Namun, pada bulan November hingga

Desember PD. BPR Bank Gresik mengalami penurunan dalam prosentase kredit bermasalahnya.

Perkembangan PD. BPR Bank Gresik pada dasarnya juga mengalami peningkatan. Untuk itu PD. BPR Bank Gresik harus tetap fokus pada upaya perbaikan kualitas agar tercapainya target dari PD. BPR Bank Gresik pada tahun 2018. Menurut peraturan bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5% dari total kredit. Semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) suatu bank, maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat. *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang diterima oleh bank tersebut. Namun, pada penyalurannya, Kredit pada PD BPR Bank Gresik tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh PD. BPR Bank Gresik karena sumber pendapatan terbesar pada PD. BPR Bank Gresik salah satunya adalah dari suku bunga.

Dalam penyaluran Kredit pada PD. BPR Bank Gresik dihadapkan dengan risiko kegagalan kredit oleh kondisi makro ekonomi maupun bank *specific factor* (Espinoza & Prazad, 2010) dengan kata lain debitur yang diberikan kredit tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam kondisi ini bank dihadapkan oleh kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian baik pada bank maupun debitur. Kegiatan penyaluran kredit sangat mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Pemberian kredit harus dilaksanakan secara sistematis untuk mencegah kredit bermasalah.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank (*multifinance*) yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan bank. Pengawasan dan pengelolaan pada pemberian kredit harus dilakukan sesuai prosedur yang memadai demi mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi. Untuk itu, diperlukan pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi termasuk adanya kemungkinan pada kredit bermasalah. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang dapat menunjang efisiensi dan efektivitas pada sistem pemberian kredit. Pengendalian internal yang baik dan efektif, maka diharapkan akan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008:163).

Pengendalian internal merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh pihak bank untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik dengan keyakinan bahwa tujuan dari pihak bank akan tercapai. Maka, diperlukannya suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan yang dilakukan oleh pihak bank, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut untuk memperkecil risiko yang mungkin akan terjadi. Adanya pengendalian internal yang efektif, maka diharapkan dapat dihindari atau dicegah hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kecurangan, penyelewengan kredit atau penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan dalam pemberian kredit merupakan fungsi manajemen yang penting. Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa analisis kredit sesuai dengan prosedur, data nasabah benar sesuai dengan proposal permohonan kredit, jumlah kredit yang diberikan benar sesuai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diperoleh tersebut, dan ketepatan tanggal pembayaran oleh nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengendalian internal terhadap pemberian di PD BPR Bank Gresik Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengambil judul tentang: “**Analisis Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PD. BPR Bank Gresik**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan permasalahan yang akan di teliti yaitu :

Bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap kebijakan pemberian kredit di PD. BPR Bank Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengendalian internal terhadap kebijakan pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep pengendalian internal dalam kredit bermasalah kepada kebijakan pengendalian internal.

2. Bidang Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil tindakan maupun menentukan kebijakan bisnis dalam rangka memperbaiki operasional bank sehingga dapat meningkatkan aktivitas pengkreditan serta kinerja keuangan.